

**PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN DI SURABAYA PADA MASA REPELITA IV TAHUN 1984-1989****Ana Khoirun Nisak**

Jurusan Pendidikan Sejarah  
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
E-mail: [anakuceh@gmail.com](mailto:anakuceh@gmail.com)

**Agus Trilaksana**

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya

**Abstrak**

Sejak masa Orde baru, Pemerintah telah meletakkan pendidikan sebagai salah satu program pembangunan di Indonesia. Upaya Pemerintah untuk menampung semua anak usia sekolah ke bangku sekolah diwujudkan dengan program Wajib Belajar 6 tahun pada awal dimulainya Repelita IV tahun 1984. Surabaya merupakan kota metropolitan dengan jumlah penduduk yang padat. Kepadatan penduduk ini disebabkan oleh tingginya arus urbanisasi penduduk di kota Surabaya. Kepadatan penduduk yang terus meningkat setiap tahun, menyebabkan beberapa permasalahan seperti pembangunan pendidikan yang belum merata dan belum menjangkau semua lapisan masyarakat, tingginya angka anak putus Sekolah, lokasi sekolah Dasar, SMTP, SLTA belum tersebar merata di seluruh Kecamatan, serta banyak mengelompok di daerah perkotaan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut (1) Bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam bidang pendidikan pada masa Repelita IV tahun 1984-1989 ?, (2) Bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam bidang pendidikan pada masa Repelita IV tahun 1984-1989 ?, (3) Bagaimana dampak kebijakan tersebut terhadap perkembangan pendidikan di Surabaya pada masa Repelita IV tahun 1984-1989 ?. Permasalahan-permasalahan tersebut diberikan penjelasan dengan melakukan analisis terhadap data-data dan sumber-sumber yang didapatkan melalui tahapan metode penelitian Sejarah. Tahapan metode penelitian Sejarah yang dilakukan meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Pada tahap heuristik sumber primer diperoleh dari Arsip dan koran sezaman. SK Walikotamadya Surabaya dan Repelita IV di Surabaya diperoleh dari Badan Perpustakaan dan Arsip Kota Surabaya, sedangkan berita sezaman diperoleh dari, *Surabaya Post* dan *Pelita* tahun 1984-1989. Adapun sumber sekunder, yaitu buku tentang Repelita dan sejarah pendidikan di Indonesia diperoleh dari perpustakaan. Tahap kedua adalah melakukan kritik terhadap sumber yang diperoleh untuk dilihat kebenarannya. Selanjutnya dilakukan interpretasi fakta-fakta yang diperoleh dari sumber, dan yang terakhir dilakukan historiografi. Fakta-fakta yang telah ditafsirkan kemudian dirangkai dan disajikan dalam tulisan yang kronologis.

Kebijakan Pemerintah Kotamadya Surabaya dalam membangun pendidikan di Surabaya bertumpu pada Intruksi Presiden 1 Maret 1983, TAP MPR Nomor II/MPR/1983, serta keputusan Gubernur Kepala Daerah tanggal 4 Desember 1985 Nomor: 421.0/643/210/1985, bahwa daerah Tingkat II pada akhir Pelita IV benar-benar bebas dari Tributa. Sasaran program pembangunan pendidikan di Surabaya meliputi: 1) Usaha pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh Pendidikan, 2) Peningkatan mutu dan relevansi Pendidikan, 3) Efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan. Program pembangunan Pendidikan di Surabaya dilaksanakan melalui peningkatan daya tampung Siswa SD, SMTP, dan SLTA dengan cara penambahan/rehabilitasi gedung-gedung sekolah, pemberantasan buta huruf, dan pengadaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan seperti buku perpustakaan, serta meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga pendidik melalui pengangkatan guru Pegawai Negeri dan penataran-penataran. Kebijakan dan pelaksanaan pembangunan pendidikan memberikan dampak yang positif bagi kondisi pendidikan di Surabaya. Pelaksanaan Wajib Belajar 6 tahun berdampak pada bertambahnya jumlah anak usia sekolah khususnya usia 7-12 tahun dan lokasi Sekolah Dasar Negeri merata pada setiap Kecamatan. Sampai pada tahun terakhir Pelita IV tahun 1988/1989, pembangunan Sekolah Dasar berjumlah 309 sekolah Negeri dan 206 sekolah Swasta. Peningkatan mutu pendidikan berdampak terhadap meningkatnya jumlah guru dan lulusan sekolah. Jumlah guru SD seluruhnya adalah 9.952, dan jumlah guru SMTP seluruhnya 9.651, sedangkan untuk SMTA jumlah guru seluruhnya 9.396. Jumlah siswa lulus EBTA sampai akhir Pelita IV adalah 14.089 untuk SD, 34.638 siswa SMTP, dan 25.612 siswa SMTA. Keberhasilan program Wajib Belajar 6 tahun berdampak pada dicanangkannya program Wajib Belajar 9 tahun bagi anak usia 7-15 tahun oleh Pemerintah.

**Kata Kunci : Pembangunan Pendidikan, Surabaya, Wajib Belajar**

### Abstract

Since the New Order era, the Government has laid education as one of the programs in Indonesia. The Government's efforts to accommodate all school-age children to school realized with program Compulsory 6 years old at the beginning of Repelita IV 1984. Surabaya is a metropolitan city with a dense population. The population density is caused by high flows of urbanization in the city of Surabaya. The population density is increasing every year, causing some problems such as the development of education is uneven and does not reach all levels of society. the high school dropout rates, location of primary school, junior high, high school is not spread evenly throughout the District, as well as many clustered in urban areas.

Based on the background of the above problems, the formulation of the problem in this study as follows. (1) How Surabaya City Government policy in the field of education during the years 1984-1989 Repelita IV?, (2) how the implementation of Surabaya City Government policy in the field of education during the years 1984-1989 Repelita IV?, (3) What is the impact of the policy on the development of education in Surabaya during the years 1984-1989 Repelita IV?. These problems are given an explanation by analyzing the data and sources obtained through the stages of history research methods. Stages of History conducted research methods includes heuristics, criticism, interpretation, and historiography. At this stage of the primary sources heuristics obtained from newspaper archives and contemporary. Mayor SK Repelita IV in Surabaya and Surabaya obtained from the Library and Archives of Surabaya, while derived from contemporary news, Surabaya Post and Pelita years 1984-1989. As a secondary source, ie Repelita and books on the history of education in Indonesia is obtained from libraries. The second stage is to criticize the resources obtained to see the truth. Furthermore, the interpretation of the facts obtained from the source, and the latter do historiography. The facts have been interpreted then assembled and presented in chronological posts.

Surabaya Municipal Government policy to develop education in Surabaya resting on March 1, 1983 Presidential Instruction, TAP MPR Nomor II/MPR/1983, as well as the decision of the Governor dated December 4, 1985 Number: 421.0/643/210/1985, that the Level II at the end of the Fourth Development Plan completely free of Tributa. Target program of education development in Surabaya include: 1) The business of equity and expanding opportunities to obtain education, 2) Improving the quality and relevance of education, 3) The efficiency and effectiveness of education management. Educational development program in Surabaya implemented through an increase in the capacity of elementary school students, SMTP, and secondary by adding / rehabilitation of school buildings, elimination of illiteracy, and the provision of educational facilities and infrastructure such as library books, and increase the number and quality of teachers through appointment of teachers and upgrading Servant-upgrading. Policy development and implementation of education have a positive impact for the state of education in Surabaya. Implementation of Compulsory 6 years have an impact on increasing the number of school-age children, especially ages 7-12 years and locations evenly State Primary School in each district. Until the last year of the Fourth Development Plan 1988/1989 year, the construction of elementary schools totaled 309 State schools and 206 private schools. Improving the quality of education have an impact on increasing the number of teachers and school leavers. The number of elementary school teachers is wholly 9.952, and the number of teachers SMTP whole 9.651, while the number of teachers entirely SMTA 9.396. The number of students graduating EBTA until the end of the Fourth Development Plan is 14.089 to SD, 34.638 students SMTP, and 25.612 students SMTA. The success of the program Compulsory 6-year impact on the introduction of compulsory nine-year program for children aged 7-15 years by the Government.

**Keywords:** Education Building, Surabaya, Compulsory

### PENDAHULUAN

Pada tahun 1969, bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan nasional secara menyeluruh, bertahap, terarah, dan berencana.<sup>1</sup> Landasan pelaksanaan pembangunan pada masa Orde Baru ialah Pancasila sebagai landasan ideal, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, TAP MPR sebagai landasan struktural dan Program-program Kabinet Pembangunan sebagai landasan operasional.<sup>2</sup> Pelaksanaan pembangunan pada

masa Orde baru selalu bertumpu pada TRILOGI pembangunan, yaitu: pembinaan stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan, dalam mewujudkan azas keadilan sosial.<sup>3</sup>

Berdasarkan catatan historis, Surabaya merupakan kota INDAMARDI, yang merupakan singkatan dari industri, dagang, maritim, dan pendidikan. Kota Surabaya sudah menjadi pusat industri sejak awal abad ke-19. Bukti bahwa Surabaya telah menjadi kota dagang adalah

<sup>1</sup> Heru Sukadri, dkk. 1986. *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Timur*. Surabaya: Depdikbud, hlm.42.

<sup>2</sup> Ary, H.Gunawan. 1986. *Kebijakan-kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, hlm. 51.

<sup>3</sup> Laidin Girsang. 1979. *Indonesia Sejak Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Laita, hlm. 25.

kedatangan para penyiur Islam dari Timur Tengah yang berprofesi sebagai pedagang. Surabaya juga dikenal sebagai kota maritim, karena selain kota ini secara geografis berada di tepi pantai, juga keberadaan *Marine Etablissement* pada zaman kolonial yang merupakan kawasan terpadu antara bengkel kapal, dok, dan pergudangan di pelabuhan yang menjadikan Surabaya sebagai kota maritim terkemuka di Indonesia.<sup>4</sup>

Sebagai kota pendidikan, Surabaya telah mengembangkan lembaga pendidikan dari tingkat rendah sampai pendidikan tinggi sejak zaman kolonial Belanda, seperti Lembaga Pendidikan Tinggi Kedokteran (NIAS) yang berdiri di kota Surabaya sejak tahun 1913.<sup>5</sup> Luas wilayah Surabaya yang mencapai 290,44 Km<sup>2</sup> mampu menampung penduduk dengan kapasitas jutaan jiwa. Selain itu, wilayah perekonomian Surabaya yang strategis menjadikan kota Surabaya sebagai salah satu tujuan Urbanisasi.

Dalam bidang pendidikan laju perkembangan penduduk usia sekolah cukup tinggi, sedangkan dilain pihak penyediaan sarana pendidikan masih belum memadai atau jumlahnya masih sangat terbatas. Hal ini menjadi perhatian Pemerintah untuk mengupayakan pemerataan pembangunan bidang pendidikan agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Sejak Pelita I, Pemerintah Pusat telah mengupayakan pembangunan pendidikan dengan pembangunan SD Inpres, penyediaan sarana, buku bacaan, dan sebagainya. Pada Repelita IV Pemerintah mengeluarkan kebijakan Wajib Belajar anak usia 7-12 tahun. Program Wajar<sup>6</sup> itu sendiri secara praktis baru dilaksanakan mulai pertengahan Juli atau pada awal tahun ajaran 1984/1985.<sup>7</sup>

Tulisan yang membahas mengenai pembangunan bidang Pendidikan khususnya di Kota Surabaya tergolong langka. Kajian mengenai pelaksanaan Repelita IV bidang Pendidikan di Surabaya sendiri belum banyak dilakukan di Universitas Negeri Surabaya, khususnya di Jurusan Pendidikan Sejarah. Untuk itu penulis ingin menyajikan tulisan ini secara utuh, yang didalamnya dijelaskan mengenai PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN DI SURABAYA PADA MASA REPELITA IV TAHUN 1984-1989.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam bidang pendidikan pada masa Repelita IV tahun 1984-1989 ?;

2) Bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam bidang pendidikan pada masa Repelita IV tahun 1984-1989 ?; 3) Bagaimana dampak kebijakan tersebut terhadap perkembangan pendidikan di Surabaya tahun 1984-1989 ?.

#### METODE

Penelitian mengenai Pembangunan Bidang Pendidikan di Surabaya pada Masa Repelita IV Tahun 1984-1989 dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan sejarah (*historical approach*), yang mempunyai empat tahapan proses penelitian yakni heuristic, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian sejarah adalah heuristic. Heuristik merupakan tahapan pertama sebagai tahapan proses mengumpulkan sumber-sumber sejarah<sup>8</sup>. Pada tahap ini peneliti melakukan pencarian dan pengumpulan sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan konteks penelitian yang dikaji. Sumber primer yang diperoleh berupa SK Walikota Surabaya dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tentang pembangunan bidang pendidikan, dan Koran-koran yang sejaman. Sedangkan sumber sekunder yang diperoleh meliputi: buku-buku tentang pendidikan pada masa Repelita IV, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kajian penelitian yang dibahas.

Langkah kedua adalah kritik. Terdapat dua macam kritik, yakni kritik ekstern untuk mendapatkan otentisitas sumber dengan melakukan penelitian fisik terhadap suatu sumber. Kritik intern untuk meneliti kredibilitas sumber yang bisa dipercaya.<sup>9</sup> Dari sumber-sumber tersebut selanjutnya dilakukan pengujian melalui kritik sumber yang terdiri dari kritik intern dan ekstern. Sumber yang diuji pada tahap ini adalah koran-koran dan SK. Pada tahap ini selanjutnya dilakukan pengkategorisasian sumber berdasarkan dua hal yaitu, tentang Kebijakan Pembangunan Pendidikan di Surabaya dan Dampak Terhadap Perkembangan Pendidikan di Surabaya.

Tahap selanjutnya adalah interpretasi. Interpretasi adalah penafsiran terhadap fakta.<sup>10</sup> Pada tahap ini peneliti akan mencari keterkaitan antara fakta-fakta yang diperoleh dengan melakukan analisis dan penafsiran, sehingga akan menjadi rangkaian sumber yang membentuk fakta. Tahapan yang terakhir adalah historiografi, yaitu merekonstruksi masa lampau berdasarkan fakta yang telah ditafsirkan dalam bentuk tulisan sesuai dengan penulisan

<sup>4</sup> Purnawan Basundoro. 2012. *Sejarah Pemerintah Kota Surabaya Sejak Masa Kolonial sampai Masa Reformasi (1906-2012)*, hlm. 82.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 83.

<sup>6</sup> Wajib Belajar diartikan sebagai suatu kewajiban bagi setiap orang tua di suatu Negara untuk menyekolahkan anak mereka yang telah menginjak usia tertentu pada jenjang sekolah tertentu pula.

<sup>7</sup> *Wajib Belajar dan Pelaksanaannya* oleh Heru Purwanto dalam "Surabaya Post" pada 21 April 1984.

<sup>8</sup> Aminuddin Kasdi, *Memahami Sejarah*, (Surabaya: Unesa University Press, 2005), hlm. 10-11.

<sup>9</sup> Suhartono Pranoto, *Teori & Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 37.

<sup>10</sup> Aminudin Kasdi, *Ibid.*, hlm 11.

sejarah yang benar.<sup>11</sup> Pada tahap ini Berdasarkan sumber dan fakta peneliti akan menyusun dan menyajikan sebuah tulisan sejarah dengan judul Pembangunan Bidang Pendidikan di Surabaya Pada Masa Repelita IV Tahun 1984-1989.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Bidang Pendidikan Pada Masa Repelita IV Tahun 1984-1989

#### 1) Perluasan Kesempatan Belajar Dan Pemerataan Pendidikan

Dalam upaya memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan, perlu dilanjutkan usaha penyediaan fasilitas untuk menampung anak-anak usia sekolah. Usaha tersebut dapatnya menjangkau kelompok masyarakat yang kurang mampu, atau cacat yang kurang dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan yang tersedia, agar mereka pun mendapat kesempatan belajar dan kesempatan meningkatkan keterampilan.<sup>12</sup>

##### a) Pendidikan Dasar

Sejalan dengan kebijaksanaan Nasional, pada tahun pertama Pelita IV Surabaya akan melaksanakan wajib belajar, sehingga semua anak usia 7-12 tahun sudah bersekolah minimal tingkat pendidikan Dasar. Untuk itu digalakkan pembinaan penyuluhan tentang wajib belajar, sehingga orang tua menyadari akan kebutuhan anaknya untuk belajar ditingkat pendidikan Dasar.

##### b) Pendidikan Menengah Tingkat Pertama

Program pendidikan Menengah Tingkat Pertama diarahkan untuk memperoleh pembinaan kepribadian, pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan umur, tingkat kemampuan, dan lingkungan serta perkembangan jiwa bagi tamatan Pendidikan Dasar. Kebijaksanaannya adalah dengan meningkatkan daya tampung SMP. Setiap Kecamatan diharapkan terdapat 1 SMP Negeri bahkan diharapkan 2 SMP Negeri.

##### c) Pendidikan Menengah Tingkat Atas

Berdasarkan tujuan pembangunan pendidikan Nasional maka program pendidikan Menengah Tingkat Atas diarahkan untuk memperoleh pembinaan kepribadian, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan umur, tingkat kemampuan dan lingkungan, serta perkembangan jiwa bagi tamatan sekolah Menengah Tingkat Pertama. Sekolah Menengah Tingkat Kejuruan dan Teknologi dikembangkan ke arah tanggap terhadap perkembangan teknologi dan penerapannya dalam prospek industri.

#### 2) Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan

Pemerintah Walikotamadya Surabaya pada Pelita IV memiliki rencana untuk tiap Taman Kanak-kanak minimal mempunyai seorang guru Negeri. Pada tiap Sekolah Dasar Negeri minimal ada 6 orang guru, dan tiap SD Negeri/Swasta minimal telah ditempatkan seorang guru Agama Pegawai Negeri, sedangkan untuk SLB/SLDB diupayakan peningkatan kualifikasi tenaga pengajar dengan meningkatkan kemampuan tenaga pengajar.<sup>13</sup>

Untuk Sekolah Menengah Tingkat Pertama, direncanakan perlu penambahan dan pengangkatan Guru baru, mengingat jumlah murid SMP yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, peningkatan kualitas dan kuantitas Guru juga perlu dilakukan. Sama halnya dengan masalah tenaga pendidik pada Sekolah Menengah Pertama, jumlah murid SMTA yang selalu meningkat pada setiap tahunnya, maka perlu diimbangi dengan penambahan dan pengangkatan guru baru.

#### 3) Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Pendidikan

Untuk efisiensi pengelolaan pendidikan, maka Pemerintah selama Repelita IV memberikan perhatian yang lebih mendalam terhadap berbagai permasalahan, terutama yang belum terselesaikan secara tuntas sesuai dengan target yang telah ditentukan/ditetapkan.

Berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan khususnya pada jenjang SMTP dan SMTA, maka perhatian Pemerintah tidak hanya mengarah pada pembangunan gedung-gedung sekolah SMTP/SMTA Negeri dan Swasta, tetapi juga mengenai pembinaannya, sebab selama ini orang tua menginginkan anaknya meneruskan ke Perguruan Tinggi. Hal ini berbanding terbalik dengan daya tampung siswa di Perguruan Tinggi termasuk Universitas Terbuka dan Perguruan Tinggi Swasta dan lain-lain yang hanya menampung sekitar 400.000 orang.<sup>14</sup>

Berdasarkan himbauan Pemerintah Pusat agar siswa Sekolah Dasar dibebaskan dari biaya pendaftaran masuk sekolah, maka di Surabaya semua Siswa Sekolah Dasar Negeri dibebaskan dari biaya pendaftaran masuk sekolah.<sup>15</sup> Berdasarkan kebijakan tersebut diharapkan jumlah anak putus sekolah dapat ditekan jumlahnya, dan seluruh anak usia 7-12 tahun bisa tertampung seluruhnya pada Sekolah Dasar.

Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, penambahan jumlah gedung sekolah lebih ditingkatkan, khususnya pengembangan pendidikan menengah kejuruan dan teknologi yang

<sup>11</sup>Louis Gotschack dalam Aminuddin Kasdi, Ibid.

<sup>12</sup> Repelita Tahun Keempat tahun 1984/1985-1988/1989 Buku III.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> "Plus" untuk Siap Pakai dalam Surabaya Post pada 4 Juni 1986.

<sup>15</sup> Biaya Pendaftaran Murid Harus Sesuai Ketentuan dalam "Surabaya Post" pada 7 Mei 1987.

diarahkan pada perkembangan teknologi dan kebutuhan lapangan kerja.

## **B. Implementasi Kebijakan Pemerintah Surabaya dalam Bidang Pendidikan Masa Repelita IV Tahun 1984-1989**

Mengenai masalah pendidikan, titik beratnya diletakkan pada upaya perluasan kesempatan belajar pada tingkat pendidikan Dasar, yang ditopang dengan upaya pemberantasan TRI KEBUTAAN.<sup>16</sup> Sedangkan masalah yang masih besar tentangannya adalah dengan berbagai keterbatasan anggaran yang ada, memang tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa target yang sudah ditetapkan sebelumnya akan mengalami hambatan.

### **1. Perluasan kesempatan belajar dan pemerataan pendidikan**

Berdasarkan kebijakan Pemerintah Walikotamadya Surabaya terkait upaya perluasan kesempatan belajar dan pemerataan pendidikan di Surabaya, maka sasaran Pemerintah dititikberatkan pada penyediaan fasilitas untuk menampung anak-anak usia sekolah yang menjangkau kelompok masyarakat yang kurang mampu, atau cacat yang kurang dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan yang tersedia.

#### **a) Pendidikan Dasar**

Pada awal Pelita IV tahun 1984/1985 s.d. tahun 1987/1988 program kegiatan Taman Kanak-kanak adalah: 1) Peningkatan daya tampung TK dengan cara penambahan gedung sekolah TK; 2) Rehabilitasi gedung/penambahan ruang TK Negeri. Untuk memberikan bimbingan dan contoh nyata, tiap kecamatan mempunyai sebuah TK Teladan yang langsung dikelola oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam rangka melaksanakan dan mensukseskan gerakan wajib belajar anak usia 7-12 tahun serta pemerataan kesempatan belajar guna mencapai target program pendidikan Dasar di Surabaya sesuai dengan harapan, telah diupayakan berbagai kegiatan yang meliputi:

1) Pendaftaran secara lengkap dan menyeluruh serta tuntas terhadap anak-anak sekolah normal dan penyandang cacat. Menurut Syumli Syadli, dalam menunjang keberhasilan program Wajib Belajar, Pemerintah telah menghapus SPP bagi Siswa SD Negeri, sebagai kompensasi pelaksanaan program Wajib Belajar, telah diberikan suntikan dana melalui subsidi yang diambil dari APBN.<sup>17</sup> Untuk Jawa Timur subsidi untuk program Wajar Rp 11 Milyar.

2) Mengadakan rekapitulasi jumlah anak usia 7-12 tahun di tiap-tiap desa. Dalam pelaksanaan Wajar, pendataan akan menentukan penyebab anak tidak mau

bersekolah. Pendataan dapat menyanai paling tidak 3 orang : anak sendiri, orang tua (wali) atau orang-orang yang dianggap mengetahui (Guru, ketua RT, RW, Kepala Desa).<sup>18</sup>

3) Penambahan dan pembangunan ruang kelas baru maupun unit baru SD Negeri maupun Swasta. Sehubungan dengan jatah pembangunan baru gedung SDN Unit I sebanyak 4 (empat) di Kotamadya Surabaya, maka untuk mengawasi jalannya pembangunan SD Inpres, Kepala Cabang Dinas P dan K Kotamadya Daerah Tk.II Surabaya mengusulkan mengenai calon Penjaga SDN Inpres.<sup>19</sup>

4) Menambah jumlah SD Pamong untuk menampung karyawan/buruh pabrik pada tempat-tempat yang berdekatan dengan daerah industri. SD Pamong (Pendidikan Anak oleh orang tua dan guru) yang didirikan di daerah Nelayan seperti, Sukolilo, Kenjeran, Rungkut, dan daerah pertanian seperti Tandes ini tiap lokasi jumlah muridnya rata-rata 17 orang.<sup>20</sup> Siswa dari SD Pamong ini, tidak ditentukan berdasarkan usianya, karena selain sekolah mereka juga bekerja.

5) Untuk mensukseskan pelaksanaan Wajib Belajar bagi anak usia 7-12 tahun, Pemerintah melakukan pendataan anak usia sekolah yang kelainan melalui satgas yang telah ada di tiap-tiap kecamatan, memberikan penyuluhan, dan memberikan informasi kepada orang tua agar putera/puterinya masuk dalam lembaga SDLG/SLB/SD Terpadu yang berdekatan dengan lokasi/pemukiman anak-anak yang berkelainan.

#### **b) Pendidikan Menengah Tingkat Pertama**

Guna meningkatkan pelayanan pendidikan Menengah Tingkat Pertama, ditargetkan penyebaran SMP Negeri dapat merata minimal sebuah SMP Negeri di setiap Desa. Oleh karena itu dilaksanakan kegiatan seperti berikut :

1) Pembangunan unit baru SMP/rehabilitasi gedung lama

2) Mengupayakan Pengadaan tanah khususnya untuk pembangunan SMP Negeri, yang prosesnya cenderung lama dan sulit karena dana bantuan yang terbatas. Hasilnya, sampai tahun terakhir Pelita IV jumlah SMP Negeri adalah 36 unit, hanya bertambah satu unit dari tahun sebelumnya.

3) Penambahan ruang kelas baru, guna meningkatkan daya tampung siswa SD. Jumlah ruang kelas pada SMP Negeri selama Pelita IV setiap tahun mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 1986/1987 sebanyak 641 kelas, tahun 1987/1988 yaitu 677 ruang kelas, dan tahun 1988/1989 sejumlah 704 kelas.<sup>21</sup>

4) Peningkatan daya tampung SMP Kejuruan, dengan cara menambah gedung SMP Kejuruan. Sampai pada tahun 1988/1989 jumlah SMP Kejuruan di Surabaya sebanyak 4 SMP kejuruan Negeri, dan 9 unit SMP Kejuruan Swasta. Jumlah murid seluruhnya pada SMP

<sup>16</sup> Naskah Sambutan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Dalam Rapat Sinkronisasi Program dan Penyusunan Anggaran Daerah Tingkat II Se Jawa Timur. Tahun 1987/1988.

<sup>17</sup> *Pungutan Bisa Nodai Sukses Wajib Belajar* dalam "Surabaya Post" pada 9 Mei 1987.

<sup>18</sup> *Peran Masyarakat Terhadap Wajar* dalam "Surabaya Post" pada 2 Mei 1984.

<sup>19</sup> Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya kepada Kepala Cabang Dinas P dan K Kotamadya Daerah Tk.II Surabaya Tahun 1986. Badan Arsip Kota Surabaya.

<sup>20</sup> *Walikota Sampaikan Dimulainya Wajib Belajar* dalam "Surabaya Post" pada 1 Mei 1984.

<sup>21</sup> Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur. *Surabaya Dalam Angka Tahun 1988*.

Kejuruan Negeri adalah 1.319 Siswa, dan jumlah murid seluruhnya pada SMP Kejuruan Swasta adalah 736 Siswa.<sup>22</sup>

5) Pembangunan Pagar sekolah dalam rangka pelaksanaan ketahanan sekolah.

c) Pendidikan Menengah Tingkat Atas

Sejalan dengan perkembangan lembaga Pendidikan Dasar maupun pendidikan Menengah Tingkat Pertama, maka lembaga Pendidikan Menengah Tingkat Atas, khususnya SMA Negeri ditingkatkan/dikembangkan dan diupayakan pada setiap wilayah Pembantu Bupati sedikitnya ada 1 SMA.

1) Peningkatan daya tampung SMTA. Sampai tahun 1988/1989, jumlah murid usia 16-18 tahun yang tertampung di SMTA Negeri sebanyak 18.035 Siswa, dan pada SMTA Swasta yaitu 61.771 Siswa, sedangkan jumlah murid usia 16-18 tahun pada SMA Kejuruan Negeri adalah 7.683, serta pada SMA Kejuruan Swasta sebanyak 23.384 Siswa.<sup>23</sup>

2) Meningkatkan peranan Sekolah Swasta yang memenuhi syarat dengan pemberian bantuan antara lain berupa tambahan ruang kelas baru, peralatan laboratorium, buku-buku, bantuan tenaga guru, latihan/penataran, pembinaan kurikulum dan administrasi sekolah, pelaksanaan akreditasi sekolah Swasta

3) Peningkatan sarana dan prasarana SMA berupa penambahan ruang kelas baru, rehabilitasi gedung, pengembangan laboratorium IPA dan Bahasa, buku pelajaran dan perpustakaan, alat-alat keterampilan

Besarnya biaya pendaftaran tahun ajaran 1988-1989 sesuai dengan SK Gubernur Jatim 25 April 1988 Nomor 422.1/9127/024/1988, yaitu biaya pendaftaran SMA Rp. 1.250,00.<sup>24</sup> Sedangkan besarnya biaya pendaftaran siswa baru pada sekolah Swasta mencapai puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan ada yang dipungut sampai 1 juta rupiah.

d) Program Pendidikan Masyarakat

Kegiatan pendidikan Masyarakat di Kotamadya Surabaya dititik beratkan kepada pembelajaran warga masyarakat yang buta huruf dan putus sekolah SD, SMTP, SMTA, dan penganggur yang khususnya membutuhkan pendidikan. Dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, masalah Tiga Buta perlu mendapatkan perhatian khusus, oleh karena itu ditempuh langkah-langkah :

1) Pemenuhan kelengkapan fasilitas secara bertahap melalui pembangunan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), mengadakan buku paket A, sarana non cetak (slide dan kaset) serta perlengkapan dan peralatan lainnya yang dapat menunjang pelaksanaan program dan kegiatan usaha penuntasan pemberantasan Tributa

2) Peningkatan motivasi kepada masyarakat melalui media masa, baik melalui surat kabar, radio, televisi, serta unsur penerangan lainnya

3) Penataran dan latihan keterampilan melalui kelompok-kelompok belajar seperti, KBPD (Kelompok Belajar Pendidikan Kejuruan Masyarakat), KBPKK

(Kelompok Belajar Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), KBU (Kelompok Belajar Usaha), KBPKM (Kelompok Belajar Pendidikan Kejuruan Masyarakat), dan KBPMP (Kelompok Belajar Pendidikan Dasar Mata Pencarian)

4) Pelaksanaan ujian Nasional untuk PLSM (Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh Masyarakat) : bahasa Inggris., tata buku, kecantikan kulit, tata rias pengantin, menjahit, akuntansi, mengetik, kecantikan rambut, elektronika

Meskipun telah diusahakan dengan cara-cara di atas, akan tetapi sampai tahun 1987/1988 masalah TRIBUTA di Kotamadya Surabaya belum sepenuhnya terselesaikan. Berdasarkan data tahun 1988 disebutkan bahwa, dari target awal Pemerintah Surabaya pada awal Pelita IV yaitu sejumlah 160.363 masih tersisa 48.701.<sup>25</sup>

## 2. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan

a) Pendidikan Dasar

Pada jenjang TK, Pemerintah meningkatkan dan pemeratakan pembagian jumlah buku-buku paket dan alat-alat peraga TK; Penataran/penyelenggaraan Kepala Guru TK dan Tenaga Teknis; Pada setiap SD Negeri minimal 6 orang guru dan seorang Kepala Sekolah ditambah seorang Penjaga Sekolah; Untuk meningkatkan mutu dan kualitas murid dengan cara menyelenggarakan pendidikan murid teladan, menyelenggarakan lomba bidang studi dalam rangka *ques Bee Asean*, menyelenggarakan berbagai lomba untuk semua murid SD dalam bentuk keterampilan dan kesenian, meningkatkan peranan anak didik dalam menunjang terlaksananya keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan kekeluargaan di lingkungan sekolah yang sehat; Penataran-penataran baik penataran Kepala Sekolah, Guru bidang studi dan lain-lain dengan mengadakan penataran-penataran bidang studi Bahasa Indonesia, Pendidikan Moran Pancasila, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, Ilmu Pengetahuan Sosial, Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika; Mulai tahun ajaran 1987-1988 cabang olahraga Senam masuk kurikulum pelajaran olah raga di SD. Nomor senam yang masuk dalam kurikulum adalah senam artistik.<sup>26</sup>

Dalam rangka mewujudkan program Wajib Belajar usia 7-12 tahun, maka dana penunjang baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Bantuan Pemerintah Pusat (Inpres) setiap tahun semakin meningkat. Dana penunjang SD Inpres sebesar Rp 1.296.000.000, untuk perbaikan gedung sekolah Dasar Negeri/Swasta sebesar Rp 134.784.000. bantuan dana untuk penunjang sekolah seperti pengadaan sarana dan prasana, penataran Guru/Kepala Sekolah, dan lain-lain bagi SD Swasta/Madrasah sebesar Rp 51.840.000.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Statistik Pendidikan 1988/1989 Kanwil Departemen P & K Propinsi Jawa Timur.

<sup>24</sup> *Biaya Pendaftaran Murid Harus Sesuai Ketentuan* dalam "Surabaya Post" pada 7 Mei 1987.

<sup>25</sup> Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur "Tributa Menurut Kabupaten/Kotamadya di Propinsi Jawa Timur" tahun 1987.

<sup>26</sup> *Senam Masuk Kurikulum SD Mulai Tahun Ini* dalam "Surabaya Post" pada 7 Mei 1987.

bantuan keuangan untuk penunjang TK dan SDN yaitu Rp 51.840.000, dan dana bantuan Pembangunan SD Inpres sebesar Rp 4.829.888.000 pada tahun 1989.

b) Pendidikan Menengah Tingkat Pertama

Dengan adanya penambahan jumlah murid SMP yang selalu meningkat dari tahun ke tahun maka perlu diimbangi dengan penambahan dan pengangkatan guru baru; Penambahan laboratorium dan alat keterampilan SMP Negeri/Swasta; Pengadaan peralatan sesuai kebutuhan; Setiap Siswa Baru akan mengikuti Penataran P4. Penataran P4 ini bersifat wajib dan dimaksudkan sebagai Usaha penanaman nilai-nilai Pancasila kepada anak didik, di samping PMP dan PSPB yang telah menjadi kurikulum; Sebanyak 16.539 Penatar telah disiapkan untuk untuk melayani siswa-siswa baru SMTP dan SMTA.<sup>27</sup>

Pada SMP Kejuruan dilakukan penambahan tenaga Pengajar baik melalui program D-1, D-2 maupun program rutin. Sampai tahun ajaran 1988/1989, jumlah guru pegawai Negeri pada SMTP Kejuruan Negeri sebanyak 1.433 orang.<sup>28</sup> Mengadakan penataran-penataran guru bidang studi dan pendidikan tambahan berupa Program Belajar Jarak Jauh (PBJJ) dan Pemantapan Kerja Guru (PKG) bidang studi; Kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum 1975 yang disempurnakan untuk SMP.

Di SMP proses belajar mengajar yang berlangsung selama 40 jam pelajaran selama Seminggu dibagi ke dalam, penyampaian bidang studi sebanyak 13 bidang studi.<sup>29</sup> Seluruhnya terbagi dalam 7 sub bidang studikelompok pendidikan umum, 10 sub bidang studi kelompok Akademis, dan 2 bidang studi Keterampilan yang pembagiannya secara fleksibel dan bervariasi. Dalam pelaksanaannya pembagian jam mengajar, untuk mengurangi resiko kejenuhan setiap Guru bidang studi diatasi maksimum 2 jam pelajaran setiap tatap muka.

c) Pendidikan Menengah Tingkat Atas

Pengadaan buku-buku pelajaran dengan lebih banyak variasi; Perlengkapan ruang praktek/keterampilan, laboratorium, dan perpustakaan untuk setiap unit; Pengadaan paket belajar SD, SMP, SMA dengan modul dan pendidikan keterampilan sebanyak 18.000 Siswa; Penelitian pengembangan paket belajar dengan modul kelas I dan II SMA sebanyak 9.552 Siswa; Pengembangan terbatas bimbingan penyuluhan dan bimbingan karier SD, SMP, SMA untuk 99 sekolah; Pada jenjang SMTA, mata pelajaran PMP dan PSPB masuk dalam Kurikulum.

Presiden Soeharto menginstruksikan agar kepada generasi Muda diberikan pengetahuan Sejarah bangsa

Indonesia terutama sejak tahun 1950 hingga terjadinya G30S/PKI, sehingga tidak terjadi membenarkan yang salah, dan menuding salah kepada yang benar.<sup>30</sup> Karena itu, Sejarah bangsa sejak tahun 1950 hingga terjadinya G30S/PKI, mengapa terjadi pemberontakan itu, dan bagaimana proses pembangunan sekarang, perlu diajarkan.<sup>31</sup>

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut di atas, maka di dalam Anggaran Belanja Pembangunan Kotamadya Dati II Surabaya selama Repelita IV, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sendiri, maupun bantuan dari Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur, yaitu bantuan dana penunjang pembangunan SMTP dan SMTA setiap tahun terus ditingkatkan, sampai tahun 1989 dana bantuan mencapai Rp 82.944.000,00 untuk SMTP Negeri/Swasta, dan Rp 62.208.000,00 untuk SMTA Negeri/Swasta. Dana tersebut digunakan untuk menunjang pembangunan gedung Sekolah Baru/Rehabilitasi gedung. Sedangkan dana bantuan dari Pemerintah Daerah Tk I Jawa Timur untuk SMAN/SMA Penunjang sebesar Rp 1.027.222.000,00.

d) Pendidikan Masyarakat

Sesuai dengan DD (Data Dasar) dan DR (Data Rencana), maak untuk program kerja sasaran masih diprioritaskan kepada warga masyarakat yang umur sampai 44 tahun dengan program :

1) Kejar Paket A, Kejar PKK, Kejar Usaha, KBPKM

2) Latihan dan informasi yang diprogramkan untuk setiap Kecamatan sebanyak 10 kelompok dan setiap kelompok sebanyak 10 orang

3) Pengadaan dan pengembangan sarana dan perlengkapan belajar yang diperlukan untuk program Paket A

4) Untuk kejar PKK, diadakan buku pegangan sumber belajar

5) Mengadakan motivasi dan pendekatan dengan Kepala Desa, PKK, dan tokoh masyarakat setempatnya

6) Dilanjutkan dengan pelajaran sekolah Dasar dan keterampilan bila kejar Paket A sudah selesai

7) Dalam Pelita IV ini sarana yang dibutuhkan disesuaikan dengan kegiatan yang diprogramkan. Program kegiatan di Kotamadya Surabaya untuk Kejar Paket A sejumlah 13 Kelurahan X 5 Kejar = 8150 Kejar berarti pengadaan sarana belajar pokok berupa paket A yang dibutuhkan : paket A1 s/d A20 sebanyak 81500 set. Sedangkan sarana perlengkapan belajar berupa : papan panel, papan tulis, kapur tulis, penghapus, buku tulis, pensil, dan sebagainya juga sebanyak 81500 set.

### 3. Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Pendidikan

<sup>27</sup> *Disiapkan 1.539 Penatar untuk Siswa Baru* dalam "Surabaya Post" pada 19 Juni 1986.

<sup>28</sup> Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur. *Surabaya Dalam Angka 1988*.

<sup>29</sup> *Potret Kelas dalam Pelaksanaan Kurikulum SMTP-SMTA* oleh Purbandana Kharisma dalam "Surabaya Post" pada 28 Juni 1986.

<sup>30</sup> *Buku Pelajaran Sejarah Perlu Diteliti Kembali* dalam "Surabaya Post" pada 2 Mei 1987.

<sup>31</sup> *Ibid.*

Efisiensi merupakan ketepatan cara/upaya Pemerintah dalam melaksanakan Pembangunan pendidikan di Surabaya, sedangkan efektivitas adalah bagaimana cara/upaya tersebut dapat memberikan dampak terhadap pendidikan di Surabaya itu sendiri. Adapaun efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan yang dimaksud meliputi tiga misi, yakni :

- **Pelaksanaan Wajib Belajar**

Upaya Pemerintah dengan melakukan pendataan bagi anak-anak putus sekolah di setiap Desa, menambah maupun merenovasi gedung Sekolah Dasar, dan bantuan dana pembangunan SD Inpres dari pemerintah Pusat, memberi dampak terhadap bertambahnya anak usia sekolah dan gedung-gedung Sekolah Dasar baik Negeri maupun Swasta. Sampai tahun 1989, jumlah Sekolah Dasar Negeri mencapai 610 unit dan SD Swasta terdiri dari 557 Unit, sedangkan jumlah murid pada tahun yang sama meningkat menjadi 188.402 pada SD Negeri dan 114.812 untuk Sekolah Dasar Swasta.<sup>32</sup>

Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dengan cara pengadaan sarana dan prasarana penunjang bagi Sekolah Dasar, seperti penambahan ruang kelas/belajar, pengadaan buku-buku bacaan/perpustakaan, termasuk penambahan dan penataran-penataran yang dilakukan terhadap guru bidang studi dan Kepala Sekolah juga telah memberi dampak yang positif terhadap pelaksanaan wajib belajar ini. Sampai tahun terakhir pelaksanaan Repelita IV bidang pendidikan di Surabaya, jumlah ruang kelas mencapai 8.394 kelas yang terbagi ke dalam ruang kelas SD Negeri dan SD Swasta. Jumlah ruang belajar adalah 3.453 unit untuk SD Negeri dan 3.170 unit pada SD Swasta, sedangkan jumlah tenaga pendidik/Guru mencapai 11.175 Guru secara keseluruhan SD Negeri/Swasta.<sup>33</sup>

- **Pelaksanaan pendidikan Sejarah dan Perjuangan Bangsa (PSPB) dalam Kurikulum 1984**

Kurikulum 1984 dikembangkan sebagai penyempurnaan kurikulum 1975 berdasarkan tiga pertimbangan, pertama adalah adanya kebijakan politik dengan ditetapkannya TAP MPR nomor II/MPR/1983 di mana dinyatakan perlunya adanya Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa sebagai mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan. Kedua adalah hasil penilaian kurikulum 1975 antara tahun 1979 s/d 1981 yang juga mencakup perkembangan kehidupan masyarakat. Perkembangan yang cepat dalam kehidupan masyarakat terutama dalam bidang ilmu dan teknologi menghendaki adanya penyempurnaan kurikulum. Ketiga adalah berdasarkan pada tujuan pendidikan nasional yang

tercantum dalam TAP MPR nomor IV/MPR/1978 dan nomor II/MPR/1983 bahwa Pendidikan Nasional berdasarkan azas Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan.

Pemberian materi pelajaran PMP selama 2 Jam pelajaran dan PSPB selama 2 jam pelajaran pada jenjang SMTP dan SMTA di Surabaya, diharapkan dapat memberi dampak bagi para Generasi Muda untuk lebih memahami Sejarah Perjuangan bangsa, terutama sejak tahun 1950 hingga terjadinya G30S/PKI. Selain itu, dengan penerapan Kurikulum 1984 dapat membawa perubahan bagi pola pikir Generasi Muda dengan adanya Cara belajar Siswa Aktif (CSBA).

- **Mengembangkan pendidikan menengah kejuruan dan teknologi ke arah tanggap terhadap perkembangan teknologi dan penerapannya dalam proyek Industrialisasi**

Meledaknya angka lulusan SMA setiap akhir tahun, yakni tahun 1983-1984 mencapai 429.000 murid, tahun 1984-1985 meningkat menjadi 512.000 murid, dan tahun 1985-1986 mencapai sekitar 635.000,<sup>34</sup> menjadi pikiran Pemerintah mengenai pembinaannya. Banyak orang tua yang menginginkan anaknya untuk melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi, sedangkan daya tampung Perguruan Tinggi tidak sebanding dengan jumlah lulusan SMA. Oleh karena itu, pada jenjang Pendidikan Menengah Pertama dan Menengah Atas, siswanya harus dibekali keterampilan khusus sehingga siap pakai, jika perlu jumlah sekolah-sekolah Kejuruan perlu ditambah.

Pendidikan Kejuruan di Indonesia kini diarahkan bersistem satu atap, programnya disesuaikan dengan kebutuhan daerah setempat. Menurut DR. Saleh Soegiyanto, mestinya jumlah sekolah Kejuruan lebih banyak dibandingkan Sekolah Umum.<sup>35</sup> Akan tetapi, mengingat membangun sekolah Kejuruan itu tergolong mahal, karena melengkapai berbagai peralatan seperti tempat praktek, mesin, laboratorium, dan sebagainya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Surabaya juga telah mengupayakan untuk menambah jumlah sekolah-sekolah Kejuruan, termasuk bantuan dana untuk menunjang pembinaan keterampilan di SMTP maupun SMTA, meskipun pelaksanaannya tergolong susah karena biaya untuk membangun Sekolah Kejuruan itu tergolong mahal.

<sup>32</sup> BPS. 1989. *Surabaya Dalam Angka 1988/1989*. Surabaya : Dinas P & K Dati II Kotamadya Surabaya dan Kanwil Dep. P & K Prop. Jatim.

<sup>33</sup> *Ibid*.

<sup>34</sup> "Plus" untuk Siap Pakai dalam Surabaya Post pada 4 Juni 1986.

<sup>35</sup> Pendidikan Kejuruan Mengarah ke Sistem Satu Atap dalam "Surabaya Post" pada 8 Mei 1987.

### C. Masalah/Hambatan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Pendidikan di Surabaya Pada Masa Repelita IV Tahun 1984-1989

#### a) Masalah Anak Putus Sekolah

Meskipun telah dilaksanakannya Wajib Belajar bagi anak usia 7-12 tahun, namun sampai tahun 1987 masih ada anak yang belum merasakan bangku sekolah, meskipun sudah jarang terdengar. Faktor penyebab orang tua tidak mau menyekolahkan anaknya yaitu kondisi ekonomi keluarga yang jauh dari mencukupi, masalah kebiasaan-kebiasaan yang terkait dengan nilai budaya masyarakat yang bersifat kurang positif, seperti kebiasaan mengawinkan anak pada usia muda, serta masalah sulitnya daerah tempat tinggal. Untuk mengatasi hal tersebut, Basyumi yang menjabat sebagai Ketua Umum PGRI, memandang perlunya diadakan penyuluhan pada masyarakat yang masih melakukan kegiatan kawin muda, melakukan pembagian waktu secara tepat antara waktu bekerja dan sekolah, serta memperbanyak jumlah sekolah di daerah terpececil yang sulit dijangkau.<sup>36</sup>

#### b) Biaya/Pungutan yang tidak Sesuai

Dalam catatan Surabaya Post, dalam EBTA-Ebtanas 1987-1988 SD, masih ada SDN di Surabaya yang melakukan pungutan di atas ketentuan SK Gubernur yang hanya Rp 4.000,00. Subsidi Pemerintah sebesar Rp 2.000,00, terhadap Siswa peserta EBTA-Ebtanas tingkat SD pada tahun ajaran 1988-1989.<sup>37</sup> Hal itu dirasa belum cukup, mengingat setiap bidang studi tidak hanya diajarkan teori tetapi juga ada prakteknya.

Tidak hanya bagi Sekolah Dasar, besarnya biaya EBTA-Ebtanas juga dirasakan pada Sekolah Menengah Atas. Berdasarkan surat edaran Kanwil Depdikbud Jawa Timur, biaya EBTA-Ebtanas untuk SMA Rp 20.000,00.<sup>38</sup>

#### c) Penerapan Kurikulum 1984

Masalah dalam penerapan Kurikulum 1984 terletak pada kendala yang dialami Guru dalam proses belajar mengajar adalah alokasi waktu.<sup>39</sup> Dampak dari pembagian kegiatan jadwal pelajaran Siswa tersebut yaitu keterbatasan Guru dalam menuntaskan proses belajar mengajar sehingga tidak mampu mencapai titik yang optimum. Kendala yang lain berupa masih tumpang tindihnya beberapa bidang studi walaupun dengan aksentuasi yang berbeda. Bagi Siswa sendiri, kurang dapat menerima mata pelajaran dengan baik, dikarenakan jadwal pelajaran yang terlalu padat.

#### d) Pendidikan Luar Biasa

Sekolah Luar Biasa di kota pada umumnya masih belum memenuhi kebutuhan, di mana orang yang ingin mendapatkan pelayanan pendidikan SLB banyak, sedangkan jumlah sekolahnya kurang, sehingga murid harus mengantri untuk bisa masuk SLB. Hal ini berlainan dengan keadaan SLB di daerah, di mana Sekolah yang mencari murid. Selain itu, pendidikan Luar Biasa menuntut pengelolaan yang agak berbeda dari pendidikan umum. Jika pada pendidikan umum terdapat Kepala Sekolah, guru-guru kelas, dan tenaga Konselor Pendidikan, maka untuk Sekolah Luar Biasa diperlukan keterlibatan beberapa tenaga ahli lainnya sesuai dengan bagiannya.<sup>40</sup>

#### e) Pendidikan Masyarakat

Masalah yang dihadapi Pemerintah dalam upaya memberantas TRIBUTA antara lain, warga masyarakat masih merasa bahwa tanpa baca tulis dapat mencari nafkah, sehingga warga belajar terpaksa berhenti sebelum paket A selesai. Kurangnya tenaga tutor/sumber belajar yang mau bekerja secara sukarela. Belum adanya buku pegangan sumber belajar untuk Kejar PKK, dan untuk Kejar Usaha, pemasaran hasil pendidikan tidak lancar.

### D. Dampak Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pendidikan Terhadap Perkembangan Pendidikan Di Surabaya Pada Masa Repelita IV Tahun 1984-1989

#### a) Bertambahnya Jumlah Sekolah dan Anak Usia Sekolah

Berdasarkan kebijakan Pemerintah Kotamadya Surabaya untuk menekan jumlah anak putus sekolah dalam rangka melaksanakan program Wajib Belajar, diketahui alasan atau penyebab anak usia 7-12 tahun tidak melanjutkan atau tidak ingin Sekolah antara lain, karena memang enggan untuk bersekolah, sakit cacat (Tuna), Kawin muda, orang tua tidak mampu, membantu orang tua, orang tua kurang perhatian, orang tua tidak tahu pentingnya sekolah, sekolah jauh atau sulit dicapai, guru tidak menarik, dan faktor-faktor lainnya.<sup>41</sup> Target yang diharapkan Pemerintah bahwa, pada Pelita IV jumlah anak usia 7-12 tahun bisa ditampung pada Sekolah Dasar sepenuhnya, apalagi dengan telah dilaksanaannya program Wajib Belajar maka tidak ada alasan bagi orang tua maupun anak usia 7-12 tahun untuk tidak sekolah.

Dampak dari pelaksanaan kebijakan tersebut adalah bertambahnya gedung Sekolah Dasar yang meningkat setiap tahunnya dan telah menyebar di setiap Kecamatan, meningkatnya jumlah anak usia Sekolah, dan peningkatan angka lulusan Sekolah. Jumlah Sekolah Dasar Negeri

<sup>36</sup> Masalahnya Bukan Karena Tak Ingin Bersekolah dalam "Surabaya Post" pada 2 Mei 1987.

<sup>37</sup> Biaya Ujian Praktek SD Ditanggung Siswa dalam "Surabaya Post" pada 21 Maret 1989.

<sup>38</sup> Biaya Ebtanas, Berapa Sebenarnya ? oleh Saiful Lazim dalam "Surabaya Post" pada 15 Maret 1989.

<sup>39</sup> Potret Kelas Dalam Pelaksanaan Kurikulum SMTP-SMTA dalam "Surabaya Post" pada 28 Juni 1986.

<sup>40</sup> Pendidikan Luar Biasa oleh Enggawati T dalam "Surabaya Post" pada 4 Mei 1987.

<sup>41</sup> Dalam Surabaya Post pada 2 Mei 1984.

seluruhnya pada 19 Kecamatan mencapai 357 unit, SD Swasta seluruhnya berjumlah 414 gedung, dan untuk SD Inpres sebanyak 252 unit. Jumlah tersebut lebih banyak jika dibandingkan pada Pelita III sebelumnya yang hanya memiliki 979 sekolah. Jumlah Siswa pada Pelita IV di seluruh Kecamatan mencapai 110.285 Siswa SD Negeri, 93.444 Siswa untuk SD Swasta, dan sebanyak 77.846 Siswa untuk Sekolah Dasar Inpres. Jadi, jumlah Siswa seluruhnya baik pada SD Negeri, Swasta, dan Inpres mencapai 281.575 Siswa. Jumlah Murid tersebut meningkat daripada jumlah murid pada Pelita III yaitu 270.547 Siswa.<sup>42</sup>

Berdasarkan pelaksanaan Pembangunan Pendidikan pada Sekolah Menengah Tingkat Pertama di Surabaya, maka dampak terhadap jumlah gedung Sekolah, murid usia Sekolah (13-15) tahun, dan jumlah kelasnya, yaitu sampai tahun 1989 jumlah sekolah mencapai 36 unit sekolah, meskipun keberadaan sekolah-sekolah tersebut belum tersebar rata pada setiap Kecamatan di Surabaya. bahwa jumlah murid SMTP seluruhnya, yaitu SMP Negeri dan SMP Swasta berjumlah 127.984 Siswa. Rata-rata ratio/murid/kelas setiap tahun selama tahun 1986/1987 sampai dengan 1988/1989 pada SMP Negeri adalah pada tahun 1986/1987 ratio kelasnya 1 : 44, pada tahun 1987/1988 adalah 1 : 44, sedangkan pada tahun 1988/1989 ratio kelasnya adalah 1 : 45. Data tersebut berarti menunjukkan bahwa target Pemerintah terhadap ratio kelas 1 : 40 belum berhasil. Sedangkan untuk jumlah Sekolah Menengah Tingkat Pertama Kejuruan adalah 4 unit SMPK Negeri dan 9 unit SMPK Swasta, dengan jumlah murid seluruhnya pada SMPK Negeri sebanyak 1.491 Siswa dan jumlah siswa SMPK Swasta seluruhnya berjumlah 851 Siswa.<sup>43</sup>

Pada jenjang Sekolah Menengah Tingkat Atas, jumlah SMTA Negeri setiap tahunnya semakin meningkat, yakni sampai tahun 1989 jumlahnya mencapai 36 unit sekolah. Akan tetapi keberadaan sekolah-sekolah tersebut belum tersebar rata pada setiap Kecamatan di Surabaya. jumlah murid SMTA seluruhnya, yaitu berjumlah 115.120 Siswa. Rata-rata ratio/murid/kelas setiap tahun selama tahun 1986/1987 sampai dengan 1988/1989 pada SMA Negeri adalah pada tahun 1986/1987 ratio kelasnya 1 : 39, pada tahun 1987/1988 adalah 1 : 40, sedangkan pada tahun 1988/1989 ratio kelasnya adalah 1 : 40. Pada SMA Swasta rata-rata ratio/murid/kelas pada tahun 1986/1987 ratio kelasnya 1 : 40, pada tahun 1987/1988 adalah 1 : 41, sedangkan pada tahun 1988/1989 ratio kelasnya adalah 1 : 41. Data tersebut berarti menunjukkan bahwa target Pemerintah terhadap ratio kelas SMA Negeri 1 : 40 telah memenuhi

target. Sedangkan untuk jumlah Sekolah Menengah Tingkat Atas Kejuruan adalah 17 unit SMAK Negeri dan 64 unit SMAK Swasta, dengan jumlah murid seluruhnya pada SMAK Negeri sebanyak 11.294 Siswa dan jumlah siswa SMAK Swasta seluruhnya berjumlah 28.533 Siswa.<sup>44</sup>

#### **b) Peningkatan Jumlah Guru dan Lulusan Sekolah**

##### **1) jumlah Guru**

Jumlah guru pada Sekolah Dasar dari tahun 1985/1986 sampai tahun 1986/1987 mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan, bahkan pada tahun 1987/1988 mengalami penurunan jumlah hingga lebih dari 100 guru, sedangkan jumlah guru pegawai Negeri setiap tahun terus mengalami penurunan. Ratio murid terhadap Guru dari tahun 1986 sampai 1989 rata-rata 1 : 29, bisa dikatakan bahwa jumlah guru tersebut belum sebanding dengan banyaknya siswa Sekolah Dasar dan Pemerintah juga belum memenuhi target yang diharapkan yaitu 1 : 15.<sup>45</sup>

Pada Sekolah Menengah Tingkat Pertama jumlah guru seluruhnya setiap tahun mengalami naik turun, peningkatan maupun penurunan yang terjadi cukup signifikan. Sampai tahun 1988/1989 jumlah guru seluruhnya yaitu 9.651, lebih sedikit jika dibandingkan tahun 1986/1987 yang mencapai 10.070 guru. Jumlah guru pegawai Negeri juga terus mengalami penurunan setiap tahunnya, yakni sampai tahun 1988/1989 berjumlah 1.789.<sup>46</sup> Ratio murid/guru rata-rata 1 : 15, bisa dikatakan sudah sesuai target yang diharapkan Pemerintah.

Pada jenjang Sekolah Menengah Tingkat Atas, jumlah guru seluruhnya terus mengalami peningkatan setiap tahun. Sampai tahun 1988/1989 jumlah guru seluruhnya mencapai 9.396 guru. Jumlah guru pegawai Negeri setiap tahun terus mengalami peningkatan yang signifikan. Sampai tahun 1988/1989 jumlah guru pegawai Negeri sebesar 2.057 guru. Sedangkan ratio murid/guru rata-rata 1 : 13. Sebuah hasil yang cukup menggembirakan dan target Pemerintah terhadap ratio murid/guru telah melampaui target sebesar 1 : 15.

##### **2) Jumlah Lulusan Sekolah**

Pada Sekolah Dasar Negeri jumlah peserta EBTA setiap tahun mengalami naik turun, hal ini berdampak pada jumlah lulusan EBTA yang juga naik turun. Pada tahun 1986/1987 jumlah siswa lulus EBTA seluruhnya 17.706, berarti ada 33 siswa yang belum lulus EBTA dari jumlah peserta seluruhnya. Pada tahun 1987/1988 jumlah siswa lulus EBTA 17.895, ada 44 siswa yang belum lulus dari total peserta seluruhnya. Pada tahun 1988/1989 jumlah siswa lulus EBTA 16.918, dan berarti 63 siswa belum lulus dari total peserta seluruhnya. Dapat disimpulkan bahwa jumlah siswa yang belum lulus EBTA pada SD Negeri setiap tahun mengalami peningkatan.

<sup>42</sup> BPS. 1988. Dinas P dan K Dati II Kotamadya Surabaya.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> BPS. 1989. Dinas P dan K Dati II Kotamadya Surabaya

<sup>46</sup> *Ibid.*

Jumlah lulusan pada SMTP Negeri mengalami naik turun, yaitu pada tahun 1986/1987 jumlah siswa yang belum lulus EBTA sebanyak 24 Siswa dari total siswa yang lulus 6.923, kemudian pada tahun 1987/1988 berhasil menekan jumlah siswa yang tidak lulus EBTA, yaitu 11 orang dari total seluruh siswa yang lulus EBTA sebanyak 8.230. pada tahun 1988/1989 jumlah lulusan kembali menurun yaitu 22 siswa dari total peserta EBTA yang lulus sebanyak 9.029.

Pada Sekolah Menengah Tingkat Atas Negeri, jumlah peserta EBTA setiap tahun mengalami peningkatan, sedangkan SMTA Swasta jumlahnya *fluktuatif*. Berbeda untuk jumlah peserta EBTA, maka jumlah siswa yang belum lulus EBTA pada SMTA Negeri jumlahnya *fluktuatif* yaitu pada tahun 1986/1987 sejumlah 22 siswa, tahun 1987/1988 sebanyak 34 siswa, dan pada tahun 1988/1989 jumlahnya meningkat kembali menjadi 34 siswa, sedangkan pada SMTA Swasta setiap tahun jumlah Siswa yang belum lulus EBTA terus mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu pada tahun 1986/1987 ada 1.087 siswa yang belum lulus, tahun 1987/1988 jumlah tersebut bisa ditekan yaitu sebanyak 993 siswa, dan tahun 1988/1989 menjadi hanya 544 Siswa yang belum lulus EBTA.

### 3) Dicanangkan Wajib Belajar 9 Tahun

Keberhasilan Pemerintah dalam melaksanakan program Wajib Belajar enam tahun, yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka partisipasi anak usia 7-12 tahun mencapai 75%, bahkan 100% pada beberapa daerah Tingkat II. Di daerah Tingkat II Surabaya sendiri, jumlah anak usia 7-12 tahun selama Pelita IV setiap tahun terus meningkat, dan sampai tahun 1988/1989 sudah tidak ada murid usia 7-12 tahun yang putus sekolah. Jumlah gedung sekolah Dasar setiap tahun juga semakin meningkat. Artinya, di Surabaya pun telah berhasil melaksanakan program Wajib Belajar.

Keberhasilan tersebut kemudian mendorong Pemerintah untuk melaksanakan program Wajib Belajar sembilan tahun yang dicanangkan pada tanggal 2 Mei 1994.<sup>47</sup> Jadi, setiap anak berusia 7-15 tahun harus bersekolah serendah-rendahnya sampai tingkat SLTP. Untuk mewujudkan program tersebut, Pemerintah akan membesarkan SPP siswa SD-SLTPN, mensubsidi SLTP Swasta, membangun gedung baru, serta mendirikan SLTP Terbuka di beberapa Daerah Tingkat II.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Pada era tahun 1969-an, yaitu pada masa Orde Baru Indonesia melaksanakan pembangunan secara menyeluruh

dan bertahap, serta selalu bertumpu pada TRILOGI Pembangunan. Rencana pembangunan Orde Baru sering kita kenal dengan Repelita, yaitu rencana pembangunan jangka panjang yang ditargetkan selama 25 tahun, dan pelaksanaannya secara bertahap setiap lima tahun sekali atau yang biasa kita sebut Pelita. Rencana Pembangunan dalam bidang pendidikan sendiri dititikberatkan pada pemerataan dan perluasan kesempatan belajar, serta peningkatan mutu pendidikan.

Usaha Pemerintah untuk memperluas kesempatan belajar, diwujudkan dengan program Wajib Belajar enam tahun bagi anak usia 7-12 tahun pada Repelita IV tahun 1984-1989. Sasaran program Wajib Belajar 6 tahun untuk menampung anak-anak usia 7-12 tahun di seluruh Daerah agar dapat ditampung pada Sekolah Dasar, mengingat selama Pelita III masih banyak anak usia tersebut yang putus sekolah atau sama sekali belum sekolah dengan berbagai kendala.

Surabaya sebagai Daerah Tingkat II di Jawa Timur juga tidak terlepas dari perhatian Pemerintah dalam sasaran pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan. Kepadatan penduduk di Surabaya yang terus meningkat menjadi penyebab munculnya berbagai masalah, khususnya berkaitan dengan pemerataan pembangunan. Masalah pembangunan pendidikan di Surabaya sampai akhir Pelita III yaitu masih banyaknya anak usia sekolah yang belum mengenyam bangku sekolah, pembangunan gedung-gedung sekolah yang belum merata pada setiap Kecamatan, dan tenaga pendidik yang masih terbatas jumlahnya.

Pada Repelita IV, rencana pelaksanaan pembangunan pendidikan di Surabaya disesuaikan dengan intruksi Presiden mengenai pelaksanaan program Wajib Belajar dan berpedoman pada prioritas program pembangunan pendidikan di Jawa Timur, yaitu Pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan, Peningkatan mutu pendidikan, serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan. Program-program tersebut telah mendapat beberapa keberhasilan, diantaranya menekan angka putus sekolah anak usia 7-12 tahun, jumlah lembaga SD baik Negeri dan Swasta telah menyebar di setiap Kecamatan di Surabaya, peningkatan jumlah tenaga Pendidik, serta bertambahnya jumlah lulusan EBTA.

Program Pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan, memiliki andil yang besar dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan di Surabaya, khususnya dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar 6 tahun, karena dari program tersebut akan menambah jumlah gedung-gedung sekolah dan daya tampung siswa.

<sup>47</sup> Darmaningtyas. 1999. *Pendidikan Pada dan Setelah Krisis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 25.

Pemerintah Surabaya melakukan program Pemerataan dan Perluasan memperoleh pendidikan dengan menambah/rehabilitasi gedung sekolah, khususnya gedung sekolah Negeri baik pada tingkat SD, SMTP, maupun SLTA yang tersebar di setiap Kecamatan di Surabaya dengan jumlah 19 Kecamatan. Selain itu, dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar, Pemerintah melakukan pendataan terhadap anak-anak usia 7-12 tahun di setiap Kecamatan yang belum atau putus sekolah. Program Pemerintah tersebut telah berhasil menambah jumlah gedung Sekolah Dasar Negeri yang sampai tahun 1988/1989 jumlahnya mencapai 609 unit yang tersebar di 19 Kecamatan dan berhasil menampung seluruh anak usia 7-12 tahun pada lembaga Sekolah Dasar, meskipun hasil yang ditunjukkan pada SMTP dan SLTA masih belum memuaskan.

Pemerintah Surabaya dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan melaksanakan beberapa kebijakan seperti pengadaan fasilitas/sarana dan prasarana penunjang pendidikan, peningkatan jumlah dan mutu guru melalui pengangkatan guru Pegawai Negeri dan penataran-penataran, serta pelaksanaan kurikulum 1984 bagi SLTA. Hal tersebut berpengaruh terhadap bertambahnya jumlah guru dan lulusan sekolah.

Tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan juga tidak luput dari perhatian Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan di Surabaya. Dengan dana penunjang yang terbatas, baik yang bersumber dari APBD maupun dana bantuan dari Pemerintah Pusat, efisiensi pengelolaan pendidikan di Surabaya terletak pada tiga aspek, yaitu pelaksanaan Wajib Belajar, Pelaksanaan pendidikan Sejarah dan Perjuangan Bangsa (PSPB) dalam Kurikulum 1984, dan Mengembangkan pendidikan menengah kejuruan dan teknologi ke arah tanggap terhadap perkembangan teknologi dan penerapannya dalam proyek Industrialisasi. Cara/usaha Pemerintah tersebut terbukti efektif dalam memberantas buta huruf dan menampung semua anak usia sekolah 7-12 tahun. Pelaksanaan Kurikulum 1984 dan PSPB juga efektif dalam meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap sejarah perjuangan Bangsa dan meningkatkan rasa persatuan. Pengembangan pendidikan Menengah Kejuruan juga berdampak terhadap meningkatnya jumlah sekolah SMTP dan SMTA Kejuruan yang disesuaikan dengan potensi daerah Surabaya, meskipun jumlahnya belum terlalu signifikan.

#### Daftar Pustaka

##### Arsip

- Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Dalam Rapat Sinkronisasi Program dan Penyusunan Anggaran Daerah Tingkat II Se Jawa Timur. Tahun 1987/1988.
- Himpunan Garis-garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia. 1988. Biro Bina Pemerintahan Umum Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur.
- Himpunan Peraturan-peraturan dan Surat-surat Keputusan di Bidang Pembangunan. Arsip Jawa Timur. 1984.
- Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 050.12/20193/021/1984 Tentang Surat Pengesahan Anggaran Biaya Proyek Bantuan Pembangunan SD Inpres 6 Tahun 1984.
- Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 050.12/10813/021/1984 Tentang Petunjuk Perkiraan Sementara Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 1984/1985.
- Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Timur kepada DPRD Propinsi Daerah Tk.I Jawa Timur mengenai Pelaksanaan Pemerintah Daerah dalam Tahun Anggaran 1984/1985. Arsip Jawa Timur. 1985.
- Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur kepada DPRD Propinsi Daerah Tingkat I tahun 1986. Arsip Jawa Timur. 1986.
- Memori Pelaksanaan Tugas Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur 1983-1988.
- Repelita Kota Surabaya tahun Keempat Tahun 1984/1985-1988/1989 Buku II B. Arsip Kota Surabaya.
- Repelita Kota Surabaya tahun Keempat Tahun 1984/1985-1988/1989 Buku III. Arsip Kota Surabaya.
- Surat Perintah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Surabaya No. 425.3/2659/411.21/1985. Surabaya, 1 Oktober 1985.
- Surat Permohonan Pengesahan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 188.45/780/411.12.1986. Surabaya, 31 Maret 1986.
- Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 413.5/467/411.32/1986 Tentang Usul Calon Penjaga SDN Inpres.
- Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 425.3/2659/411.21/1985 Tentang Penyaluran Alat-alat Sekolah Melalui Koperasi.
- Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 143 Tahun 1986 tanggal 24 Maret 1986 Tentang Team Pembina Subsidi/Bantuan Pembeayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1985/1986.

##### Koran

- “Ahmad Zakir: Guru Sebagai Pendidik” *Pelita*, 9 Juli 1985.

- “Biaya Pendaftaran Murid Harus Sesuai Ketentuan” *Surabaya Post*, 7 Mei 1987.
- “Biaya Ujian Praktek SD Ditanggung Siswa” *Surabaya Post*, 21 Maret 1989.
- “Buku Pelajaran Sejarah Perlu Diteliti Kembali” *Surabaya Post*, 2 Mei 1987.
- “Disiapkan 1.539 Penatar untuk Siswa Baru” *Surabaya Post*, 19 Juni 1986.
- “Enggawati T: Pendidikan Luar Biasa” *Surabaya Post*, 4 Mei 1987.
- “Heru Purwanto: Wajib Belajar dan Pelaksanaannya” *Surabaya Post*, 21 April 1984.
- “Jangan Sampai Anak Didik Alami Kegersangan Nilai” *Surabaya Post*, 3 Juli 1989.
- “Masalahnya Bukan Karena Tak Ingin Bersekolah” *Surabaya Post*, pada 2 Mei 1987.
- “Pendidikan Kejuruan Mengarah ke Sistem Satu Atap” *Surabaya Post*, 8 Mei 1987.
- “Peran Masyarakat Terhadap Wajar” *Surabaya Post*, 2 Mei 1984.
- “”Plus” untuk Siap Pakai” *Surabaya Post*, 4 Juni 1986.
- “Potret Kelas Dalam Pelaksanaan Kurikulum SMTP-SMTA” *Surabaya Post*, 28 Juni 1986.
- “Pungutan Bisa Nodai Sukses Wajib Belajar” *Surabaya Post*, 9 Mei 1987.
- “Purbandana Kharisma: Potret Kelas dalam Pelaksanaan Kurikulum SMTP-SMTA” *Surabaya Post*, 28 Juni 1986.
- “Saiful Lazim: Biaya Ebtanas, Berapa Sebenarnya ?” *Surabaya Post*, 15 Maret 1989.
- “Senam Masuk Kurikulum SD Mulai Tahun Ini” *Surabaya Post*, 7 Mei 1987.
- “Walikota Sampaikan Dimulainya Wajib Belajar” *Surabaya Post*, 1 Mei 1984.
- Costressau, Armando. *The Suma Oriental of Tome Pire (1515) : An Account of The East From Red Sea to Japan, Written in Malaca and India (London : Hakluyt Society, 1941).*
- Darmaningtyas. 1999. *Pendidikan Pada dan Setelah Krisis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Lima Replita Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Pusat Perbukuan.
- Dick, Howard. 1997. *Balance Development : East In The New Order*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dudung Abdurrahman. 2007. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Jogjakarta: Ar-Ruzz.
- Dukut Imam Widodo. 2008. *Hikajat Soerabaia Tempo Doeloe*. Surabaya: Dukut Publishing.
- Heru Sukadri, dkk. 1986. *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Timur*. Surabaya:Depdikbud.
- Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur “Tributa Menurut Kabupaten/Kotamadya di Propinsi Jawa Timur” tahun 1987
- Laidin Girsang. 1979. *Indonesia Sejak Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Laita.
- Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto. 2008. *Sejarah nasional Indonesia: Zaman Jepang dan zaman Republik Indonesia, ±1942-1998*. PT Balai Pustaka.
- Muhammad Rifa’i. 2011. *Sejarah Pendidikan Nasional: Dari Masa Klasik Hingga Modern*. Jogjakarta. Ar-Ruzz.
- Purnawan Basundoro.2012. *Sejarah Pemerintah Kota Surabaya Sejak Masa kolonial sampai Reformasi (1906-2012)*. Surabaya: Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga dan Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya.
- Rahardjo Adisamita. 2005. *Pembangunan Ekonomi Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

### Buku

- Aminuddin Kasdi. 2008. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press.
- Arnican Aziz. 1994. *Lima GBHN: 1973-1978-1983-1988-1993*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ary, H.Gunawan. 1986. *Kebijakan-kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Badan Pusat Statistik. 1984. *Surabaya dalam Angka 1984-1985*. Pemerintah Daerah Tingkat II Surabaya.
- Badan Pusat Statistik. 1986. *Surabaya dalam Angka 1984-1985*. Pemerintah Daerah Tingkat II Surabaya.
- Badan Pusat Statistik. 1987. *Surabaya dalam Angka 1984-1985*. Pemerintah Daerah Tingkat II Surabaya.
- Badan Pusat Statistik. 1988. *Surabaya dalam Angka 1984-1985*. Pemerintah Daerah Tingkat II Surabaya.
- C.E.Beeby. 1980. *Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.